

4 Pedagang di Pasar Kopro Dinyatakan Positif Covid-19

JAKARTA (IM) - Sebanyak empat pedagang Pasar Kopro, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, positif Covid-19, usai dilakukan test swab oleh petugas, pada 16 Juni 2020.

Atas dasar itu, Camat Grogol Petamburan Didit Sumaryanta telah menutup Pasar Kopro selama tiga hari.

"Iya mulai hari ini ditutup sampai tiga hari ke depan," kata Didit kepada wartawan, Senin (29/6).

Kata Didit, selama penutupan Pasar Kopro akan disemprot disinfektan. Mempercepat itu, ia kini telah berkoordinasi dengan pengelola pasar, termasuk PD Pasar Jaya selaku otoritas.

"Tapi untuk antisipasi me-

yang kami koordinasi dengan PD Pasar Jaya supaya dilakukan penutupan, terus hari ini akan dilakukan penyemprotan disinfektan," tandasnya.

Sementara itu terpisah, Kasudis Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat, Kristi Wathini mengatakan, terdapat empat yang dinyatakan positif swab test.

"Dari 135 pedagang, empat di antaranya positif covid," kata Kristi melalui pesan singkatnya.

Sebelumnya, ratusan pedagang sayur, buah, daging di Pasar Kopro menjalani *swab test* massal pada 16 Juni 2020. Melihat kondisinya yang berada di tengah pemukiman, sangat berbahaya bila penanganan tidak disegerakan. ● **ber**

Tidak Lolos PPDB Jalur Zonasi, Siswa Bisa Daftar Jalur Prestasi

JAKARTA (IM) - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta kembali membuka penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur prestasi pada 1-3 Juli 2020. Para siswa yang tak lolos PPDB jalur zonasi bisa mendaftar untuk masuk sekolah impiannya pada jalur tersebut.

"Peserta didik yang belum lolos seleksi maka dapat daftar kembali pada jalur prestasi akademik yang akan dibuka pada 1-3 Juli 2020," kata Kadisdik DKI Jakarta Nahdiana dalam konferensi video, Senin (29/6).

Jalur prestasi dikhususkan bagi pelajar berprestasi yang ingin bersekolah tanpa terikat zonasi. Jalur ini memang mengakomodir pelajar berprestasi secara akademik dengan kuota mencapai 25% untuk SMP-SMA.

"Terdiri dari 20 persen untuk calon peserta didik baru dari DKI Jakarta dan 5 persen untuk CPDB luar DKI Jakarta," jelasnya.

Disdik DKI Jakarta menyiapkan kuota mencapai 55% untuk jalur prestasi di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang terdiri 50% untuk pelajar Ibu Kota dan sisanya 5% untuk siswa di luar Jakarta.

"Seleksi utama yang digunakan di jalur prestasi akademik perhitungannya nilai rata-rata akademik selama 5 semester terakhir dan akreditasi sekolah asal," tuturnya.

Sementara bagi siswa yang dinyatakan lolos jalur zonasi diminta supaya segera

melapor diri. Dinas Pendidikan akan menunggu para siswa yang telah lulus untuk melapor diri hingga Selasa 30 Juni 2020. "Bagi orangtua peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi jalur zonasi, jangan lupa untuk melakukan lapor diri mulai hari ini sampai besok pukul 14.00 WIB," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Nahdiana, dalam video konferensi, Senin (29/6).

Sesuai ketentuan Surat Keputusan Kadisdik DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis PPDB, lapor diri dilakukan secara online dengan cara seperti mengakses situs ppdb.jakarta.go.id, melakukan login dengan cara input nomor peserta dan password. Kemudian, klik tombol "Lapor Diri", dan mencetak tanda bukti lapor diri.

Sementara itu, bagi calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi jalur zonasi bisa mendaftar PPDB melalui jalur prestasi akademik. "Peserta didik yang belum lolos seleksi, maka dapat daftar kembali pada jalur prestasi akademik yang akan dibuka tanggal 1-3 Juli 2020," katanya.

Dalam PPDB jalur prestasi akademik, calon siswa bisa memilih tiga pilihan SMP atau SMA/SMK di seluruh wilayah Jakarta. PPDB jalur prestasi akademik akan diseleksi berdasarkan nilai rata-rata selama lima semester di jenjang sekolah sebelumnya dan akreditasi sekolah asal. ● **mar**

4 Metropolis

IDN/ANTARA



PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL 2020
Petugas kesehatan memasang alat kontrasepsi jenis implant kepada warga akseptor di RSUD Ciracas, Jakarta, Senin (29/6). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB) serentak sejuta akseptor di seluruh Indonesia secara gratis dalam rangka peringatan ke-27 Hari Keluarga Nasional (HARGANAS).

Reklamasi Kawasan Ancol, Anies Diminta Bangun 4.000 Unit Rusun untuk Nelayan

Pemberian izin perluasan reklamasi kawasan Ancol dan Dufan merupakan ironi karena sebelumnya Gubernur Anies Baswedan pernah berjanji akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Justin Adrian meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pengembang proyek reklamasi kawasan Ancol membangun 4.000 unit rusun untuk nelayan. Hal ini untuk menanggapi keputusan Anies yang menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) seluas 155 hektar.

Di dalam Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020, diatur berbagai kewajiban yang harus dipenuhi pihak pengembang seperti menyediakan utilitas hingga membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu, pengembang juga wajib menyerahkan 5 persen atau sekitar 6 hektar lahan dari luas kotor daerah yang berhasil diperluas lebih kurang 35 hektar dan 120 hektar wajib diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota.

"Wilayah Jakarta Utara masih terdapat ribuan warga Jakarta yang hidup di rumah tidak layak dan lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, menurut kami akan lebih baik apabila lahan 6 hektar tersebut digunakan untuk membangun permukiman nelayan," ucap Justin saat dihubungi, Senin (29/6).

Menurutnya, kawasan permukiman nelayan tersebut bisa berupa kompleks terpadu yang di dalamnya terdapat unit rusun, pasar, sekolah, dan puskesmas.

"Agar penggunaan lahan lebih efisien, maka permuki-

man tersebut sebaiknya berupa rumah susun (rusun). Kami perkiraan, di lahan 6 hektar bisa dibangun setidaknya 4.000 unit rusun. Dengan asumsi tiap tower memiliki 16 lantai dan luas unit rusun 50 meter persegi," katanya.

Agar tidak membebani APBD, lanjut Justin, Anies dapat memerintahkan agar pihak pengembang menyisihkan keuntungannya untuk membangun rusun nelayan. Caranya, Anies bisa memanfaatkan klausul "kontribusi tambahan" yang terdapat di dalam Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 dikumpulkan keempat huruf b angka 3 yang berbunyi "Kewajiban tambahan yang akan ditetapkan oleh Gubernur".

"Penggunaan klausul kontribusi tambahan merupakan diskresi gubernur. Kasarnya, suka-suka gubernur mau dipake untuk apa. Oleh karena itu, urusannya sederhana karena hanya butuh political will. Jika gubernur mau, maka akan terwujud rusun untuk nelayan. Tapi kalau gubernur tidak ada niat membantu rakyat, maka akan ada banyak alasan," tuasnya.

Diketahui, Anies menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi. Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Keputusan tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar. Anies meneken Keputusan ini pada 24 Februari

2020 lalu.

"Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi (Dufan) seluas lebih kurang 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar," tulis Anies dalam Keputusan itu.

Kepgub ini juga menyebutkan, pelaksanaan perluasan kawasan terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurangan material, dan pematangan lahan hasil perluasan kawasan. Pembangunan di atas lahan perluasan kawasan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Masterplan dan Panduan Rancangan Kota (Urban Design Guidelines/UDGL) serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Hasil pelaksanaan perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada dikumpulkan harus disertifikatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk," tulis Keputusan itu.

Langgar Janji Kampanye
Koalisi Rakyat untuk Ke-

adilan Perikanan (KIARA) sebelumnya mengancam keras Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran telah memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol seluas lebih kurang 150 hektar untuk perluasan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan). Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati mengatakan bahwa izin perluasan reklamasi kawasan Ancol dan Dufan adalah ironi karena Anies pernah berjanji akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Susan menyebutkan, Keputusan tersebut memiliki cacat hukum karena hanya berdasarkan pada tiga Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Ia menilai ketiga Undang-Undang tersebut, terlihat dipilih

oleh Anies Baswedan karena sesuai dengan kepentingannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Padahal di dalam pengaturan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, ada Undang-Undang spesifik yang mengatur hal ini, yaitu UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kenapa UU tersebut tidak dijadikan dasar oleh Anies?" kata Susan bertanya.

Pemberian izin reklamasi untuk perluasan kawasan rekreasi di Pantai Ancol, lanjut Susan, hanya akan memperkuat praktik komersialisasi kawasan pesisir di Teluk Jakarta yang tidak sejalan dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2010. "Kawasan pantai, pesisir, dan perairan adalah milik seluruh warga negara Indonesia. Siapapun berhak untuk mengakses. Pemberian izin ini akan memaksa orang yang mau masuk dan mengakses kawasan ini harus membayar. Inilah praktik komersialisasi yang harus dilawan," ungkapnya. ● **osm**

42 Puskesmas di Kota Bekasi Serentak Lakukan Pelayanan KB

FOTO/MDL



Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto (kanan).

BEKASI (IM) - Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menghadiri Peringatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kota Bekasi. Senin, (29/6).

Di hari Peringatan Keluarga Nasional Tingkat Kota Bekasi, sejumlah 42 puskesmas di Kota Bekasi mengadakan Pelayanan Keluarga Berencana (KB).

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto datang bersama Kepala Dinas Pengendalian Keluarga Berencana, Camat Mustikajaya, Lurah Se-Kecamatan Mustikajaya, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bekasi, Kodim 0507 Bekasi, Kapolsek Mustikajaya Kota Bekasi serta para Aparatur Pemerintah Kota Bekasi.

Peringatan Hari Keluarga Nasional bertujuan menumbuhkan kesadaran para keluarga Indonesia untuk mulai menanam karakter yang memiliki nilai revolusi mental di dalam setiap individu anggota keluarga dan diharapkan dapat lebih mengenal karakternya.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan di kegiatan ini dalam rangka Harganas Ke-27 Tingkat Kota Bekasi merupakan momentum yang penting bagi para keluarga, mengingat pentingnya rasa kasih sayang terhadap istri dan anak-anak untuk menjadi keluarga yang baik, sehat dan berkualitas.

"Momentum ini akan terus selalu dilaksanakan setiap tahunnya, supaya kita bisa menjadikan keluarga-keluarga yang harmonis dan berkualitas," sebut Tri.

Tri Adhianto mengatakan walaupun di saat pandemi Virus Covid-19 ini, pihaknya akan terus selalu beraktifitas dengan biasanya, tetapi harus sesuai dengan protokol kesehatan yang ada saat ini dan penting untuk harus menyikapinya saat ini. ● **mdl**

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk	
Direksi PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk berkedudukan di Jakarta ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020.	
Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") serta Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan Rapat akan diumumkan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020.	
Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening Efek dan/atau Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.	
Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 12 POJK No. 15/2020 dan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, serta harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat.	
Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham	
Mengingat status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona yang ditetapkan Pemerintah, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (2) POJK No. 15/2020 Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System (e-SYSGEM) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2020.	
Jakarta, 30 Juni 2020 PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk Direksi	

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT INDO KOMODITI KORPORA TBK DAN ENTITAS ANAK

KONTOR PUSAT:

Gedung Centennial Tower Lantai 21, Unit H
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 12930
Telp. (021) 22958323; Fax (021) 22958324

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Per 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

	31 Des 2019	31 Des 2018		31 Des 2019	31 Des 2018
ASET			LIABILITAS DAN EKUITAS		
Aset Lancar			LIABILITAS		
Kas dan setara kas	26.536	63.776	Liabilitas Jangka Pendek		
Piutang usaha	163.398	221.232	Utang bank	299.393	306.470
Persediaan	40.832	46.799	Utang usaha	2.638	55.569
Uang muka	34.399	41.461	Biaya yang masih harus dibayar	265	1.875
Biaya dibayar di muka	68	354	Utang lain-lain	727	-
Pajak dibayar dimuka	4.774	3.007	Utang pajak	63	5.146
Jumlah Aset Lancar	270.007	376.629	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	303.086	369.061
Aset Tidak Lancar			Liabilitas Jangka Panjang		
Aset Pajak Tangguhan	4.145	3.980	Liabilitas imbalan pasca kerja	16.579	15.921
Piutang pihak berelasi	73.165	31.275	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	16.579	15.921
Aset tetap - neto	115.099	117.481	JUMLAH LIABILITAS	319.665	384.982
Goodwill	5.312	5.312	EKUITAS		
Jumlah Aset Tidak Lancar	197.721	158.048	Modal	168.367	168.367
			Agio saham	21.887	21.887
			Pendapatan komprehensif lainnya	2.122	1.522
			Saldo rugi	(45.620)	(43.524)
			Kepentingan non pengendali	146.756	148.252
			Jumlah Ekuitas	148.062	149.695
JUMLAH ASET	467.728	534.677	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	467.728	534.677

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Jutaan Rupiah)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahkan modal disetor lainnya	Saldo Laba		Jumlah	Kepentingan non pengendali	Jumlah ekuitas
			Belum ditentukkan penggunaannya	Pendapatan komprehensif lainnya			
Saldo 31 Desember 2017	168.367	21.887	(47.974)	(1.064)	141.217	1.396	142.612
Pendapatan komprehensif lainnya	-	-	4.449	-	4.449	21	4.470
Saldo 31 Desember 2018	168.367	21.887	(43.524)	1.522	148.252	1.443	149.695
Perubahan KNP atas pendapatan komprehensif lainnya - ekuitas	-	-	-	(9)	(9)	(152)	(161)
Perubahan ekuitas lainnya	-	-	2.105	-	2.105	-	2.105
Laba (rugi) periode berjalan	-	-	(4.200)	-	(4.200)	23	(4.177)
Pendapatan komprehensif lainnya	-	-	-	608	608	(6)	602
Saldo 31 Desember 2019	168.367	21.887	(45.620)	2.121	146.756	1.308	148.063

Pengurus Perusahaan
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Hendrik Rosandi
Komisaris Independen : Arie Rinaldi
Direksi
Presiden Direktur : Sujaka Lays
Direktur Independen : Mintoro Sun

Catatan:
Laporan Keuangan Konsolidasian Per 31 Desember 2019 dan 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan yang telah mengeluarkan laporan Auditor Independen tanggal 29 Juni 2020 dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Jakarta, 30 Juni 2020
PT Indo Komoditi Korpora dan Entitas Anak
Direksi

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

	31 Des 2019	31 Des 2018
Arus kas bersih dari aktivitas operasi		
Penerimaan kas dari pelanggan	593.553	514.155
Pembayaran kepada pemasok	(497.931)	(411.008)
Pembayaran kas untuk beban operasional	(17.170)	(22.457)
Pembayaran kas untuk karyawan	(24.472)	(26.318)
Penerimaan kas lainnya	-	3.435
Pembayaran kas untuk pajak	(7.870)	(3.869)
Pembayaran kas untuk bunga	(31.938)	(33.010)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	14.171	20.929
Arus kas bersih dari aktivitas investasi		
Perolehan aset tetap	(2.479)	(5.628)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(2.479)	(5.628)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan		
Penerimaan (pembayaran) pihak berelasi	(41.890)	-
Penerimaan (pembayaran) utang bank	(7.076)	(61.196)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(48.966)	(61.196)
Kenaikan bersih kas dan setara kas	(37.275)	(45.895)
Kas dan Setara Kas Awal tahun	63.776	109.671
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	26.536	63.776

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

	31 Des 2019	31 Des 2018
Pendapatan Usaha	535.720	735.094
Beban Pokok pendapatan	(474.862)	(663.625)
Labanya Bruto	60.857	71.468
Beban pemrosesan	(7.148)	(8.631)
Beban umum dan administrasi	(18.298)	(26.094)
Pendapatan (beban) lain-lain - neto	(31.938)	(33.010)
Labanya Sebelum Pajak Penghasilan	(7.045)	2.776
Pajak Penghasilan	(3.572)	2.509
Labanya Bersih Periode Berjalan	(652)	(2.038)
Pendapatan komprehensif lain	(4.224)	4.470
Pos-pos yang tidak diklasifikasikan ke laba rugi	-	-
Keuntungan (kerugian) aktuarial	819	3.483
Manfaat pajak penghasilan terkait	(205)	(871)
Labanya Komprehensif Periode Berjalan	(3.610)	7.082
Labanya diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(4.200)	4.449
Kepentingan non-pengendali	(23)	21
Labanya rugi komprehensif yang diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(3.593)	7.035
Kepentingan non-pengendali	(17)	47
	(3.610)	7.082